



Adinda Angraini¹
 Ayu Salsabila²
 Rizky Aisnania³
 Widia Fitra Hadana⁴
 Dea Mustika⁵

PENDIDIKAN INKLUSI SEBAGAI PERAN PENTING DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN SETARA KEPADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Abstrak

Anak-anak penyandang cacat memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan. Sayangnya, ketersediaan pendidikan yang memadai untuk anak berkebutuhan khusus tidak memadai dan setara. Karena penyediaan sekolah luar biasa hanya ada di kota-kota besar. Pendidikan inklusi datang sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah sosial anak penyandang cacat. Tujuan pembentukan sekolah inklusif adalah meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Sekolah inklusi juga memberi kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus dan kurang mampu menempuh pendidikan pascasarjana.

Kata Kunci: Pendidikan inklusi, Anak Berkebutuhan Khusus, Pentingnya Pendidikan Inklusi

Abstract

Children with disabilities have the same rights as children in general to receive education. Sadly, availability of adequate education for children with needs specifically inadequate and equal. Because of the provision of external schools usually only found in big cities. Inclusive education is coming as an alternative solution to overcome children's social problems people with disabilities. The aim of establishing inclusive schools is: Minimize the impact caused by an exclusive attitude. Inclusive schools also provide opportunities for children have special needs and are less able to pursue education postgraduate.

Keywords: : Inclusive Education, Children With Special Needs, The Importance Of Inclusive Education

PENDAHULUAN

Permasalahan anak penyandang Disabilitas akan terus meningkat seiring meningkatnya tekanan dari lingkungan sosial Anak penyandang Disabilitas akan terus mengalami keterbatasan karena ada yang salah dengan cara pandang masyarakat terhadap penyandang Disabilitas (Oliver, 1996). Pendapat ini menunjukkan bahwa yang menimbulkan masalah sosial terhadap anak penyandang Disabilitas adalah masyarakat itu sendiri yang menekan dan memberikan keterbatasan terhadap anak penyandang Disabilitas.

Selama ini pandangan masyarakat terhadap penyandang Disabilitas sebagai kaum yang memiliki ketidakmampuan dan keterbatasan fisik ataupun mental, yang selalu menjadi beban, tidak berguna, harus selalu dibantu dan dikasihani. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap penyandang Disabilitas disebabkan karena budaya yang masih melekat di masyarakat. Misalnya banyak keluarga yang beranggapan bahwa memiliki anak Disabilitas merupakan sebuah aib sehingga anak mereka hanya dipingit di dalam rumah tidak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tidak mengenyam pendidikan yang tentunya berdampak pada psikis si anak dan masa depannya.

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau
 email: adindaangraini.1108@gmail.com, bayusalsabila717@gmail.com, kyaisna@gmail.com,
 widiafitra576@gmail.com

Pendidikan sangat dibutuhkan bagi anak-anak untuk mencapai kesejahteraan sosialnya. Tak terkecuali anak-anak yang kurang beruntung baik dalam segi fisik maupun mental. Namun kenyataan di lapangan, anak-anak yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus menjadi anak yang dapat dikatakan mendapat pengecualian.

Rencana pendidikan nasional, pendidikan untuk belum semua terpenuhi. Sebanyak 49.647 anak berkebutuhan khusus dari total sekitar satu juta anak berkebutuhan khusus yang dapat mengenyam pendidikan. Eksklusivitas dalam pendidikan menutup kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan. Sikap eksklusivitas semakin membuat anak yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus semakin terpinggirkan. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sosial anak penyandang Disabilitas adalah dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, cultural, maupun bahasa (Leni, 2008: 202). Tujuan dari dibentuknya sekolah inklusi adalah untuk menekan dampak yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Sekolah inklusi juga memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus dan kurang beruntung dapat mengenyam pendidikan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif di mana data dikumpulkan melalui kajian literatur. Literatur-literatur yang digunakan dalam penelitian yang telah digunakan adalah jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri artikel-artikel dari jurnal elektronik yaitu melalui google scholar yang dapat memperkuat hasil analisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi 3 tahapan yaitu organize, synthesize. Pada tahapan pertama yaitu organize, penulis mengorganisasikan dan meriview literature-literatur yang akan digunakan agar relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pada tahapan ini, penulis melakukan pencarian ide, tujuan dan simpulan, dari beberapa literatur dimulai dari membaca abstrak, pendahuluan, metode serta pembahasan dan mengelompokkan literatur berdasarkan kategori-kategori tertentu. Kedua, synthesize yakni menyatukan hasil organisasi literatur menjadi suatu ringkasan agar menjadi satu kesatuan yang padu, dengan mencari keterkaitan antar literature.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Inklusi

Pengertian Pendidikan Inklusi Pendidikan inklusi pengertian sederhananya yaitu memasukkan anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah regular bersama dengan anak normal lainnya. Oleh karena itu, semua anak dari kemampuan ketidakkampuannya, jenis kelamin, status sosial ekonomi, suku, latar belakang budaya, bahasa, dan agama, menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. Pendidikan Inklusi menurut Staub dan Peck adalah penempatan anak berkelainan dari berbagai tingkat, mulai dari tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh dikelas regular. Hal ini menunjukkan bahwa kelas regular merupakan kelas yang sesuai bagi anak berkelainan apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.

Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO berasal dari kata Education for All yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi. Pada titik ini tampak bahwa konsep pendidikan inklusif sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik kependidikan hanya karena perbedaan kondisi awal dan latar belakangnya. Inklusifpun bukan hanya bagi mereka yang berkelainan atau luar biasa melainkan berlaku untuk semua anak.

Tujuan Pendidikan Inklusi

Tujuan Pendidikan Inklusi Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan.

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Tujuan pendidikan inklusi menurut Herawati (2021) adalah 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. 2. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar 3. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.

Manfaat Pendidikan Inklusi

Berikut ini ada beberapa manfaat pendidikan inklusi, antara lain:

a. Bagi anak,

yaitu: kepercayaan dirinya berkembang; bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya; belajar secara mandiri; mencoba memahami dan mengaplikasikan pelajaran di sekolah dalam kehidupan sehari-hari; berinteraksi secara aktif bersama teman dan guru; belajar menerima perbedaan dan beradaptasi terhadap perbedaan; serta anak menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran.

b. Bagi Guru,

yaitu: mendapat kesempatan belajar cara mengajar yang baru dalam melakukan pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam; mampu mengatasi tantangan; mampu mengembangkan sikap yang positif terhadap anggota masyarakat; anak dan situasi yang beragam; memiliki peluang untuk menggali gagasan baru melalui komunikasi dengan orang lain di dalam dan di luar sekolah; mampu mengaplikasikan gagasan baru dan mendorong peserta didik lebih proaktif, kreatif dan kritis; serta memiliki keterbukaan terhadap masukan dari orangtua dan anak untuk memperoleh hasil yang positif.

c. Bagi orangtua,

yaitu: orangtua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana anaknya dididik; mereka secara pribadi terlibat dan merasa lebih penting untuk membantu anak belajar ketika guru bertanya pendapat mereka tentang anak; orangtua merasa dihargai dan menganggap dirinya sebagai mitra setara dalam memberi kesempatan belajar yang berkualitas untuk anak serta orangtua juga dapat belajar bagaimana cara membimbing anaknya di rumah dengan lebih baik, yaitu dengan menerapkan teknik yang digunakan guru di sekolah.

d. Bagi masyarakat,

yaitu: lebih merasa bangga ketika lebih banyak anak bersekolah dan mengikuti pembelajaran; menemukan lebih banyak calon pemimpin masa depan yang disiapkan untuk berpartisipasi aktif di masyarakat; masyarakat melihat potensi masalah sosial seperti kenakalan dan masalah remaja dapat dikurangi, serta masyarakat menjadi lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat.

e. Bagi lembaga,

yaitu: memberikan kontribusi yang sangat besar bagi program wajib belajar; memberikan peluang terjadinya pemerataan pendidikan bagi semua kelompok masyarakat; menggunakan biaya yang relatif lebih efisien; mengakomodasi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Prinsip Pendidikan Inklusi

Sejalan dengan itu Florian (Mudjito dkk, 2012: 33) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif mempunyai prinsip-prinsip filosofis sebagai berikut:

- a. Semua anak mempunyai hak untuk belajar dan bermain bersama.
 - b. Anak-anak tidak boleh direndahkan atau dibedakan berdasarkan keterbatasan atau kesulitannya dalam belajar.
 - c. Tidak ada satu alasanpun yang dapat dibenarkan untuk memisahkan anak selama ia sekolah.
- Anak-anak saling memiliki bukan untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Prinsip Pendidikan Inklusi yaitu:

- a. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, pendidikan inklusif merupakan strategi untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, dan juga merupakan strategi peningkatan mutu pendidikan. Tentunya hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyusun strategi ini.
- b. Prinsip Kebutuhan individual, setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, sehingga pendidikan inklusi harus berorientasi pada Program Pembelajaran Individu (PPI), pendidikan didasarkan pada kebutuhan anak.
- c. Prinsip Kebermaknaan, pendidikan inklusif harus menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.
- d. Prinsip Keberlanjutan, pendidikan inklusif harus diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.
- e. Prinsip Keterlibatan, dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

Sistem Dukungan Pendidikan Inklusi

Dalam mengimplementasikan PI, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) memerlukan adanya sistem dukungan dalam upaya mempercepat pemenuhan akses dan mutu pendidikan untuk semua (Educational for All). Sistem dukungan tersebut diberikan secara eksternal dan internal.

Berikut adalah beberapa komponen sistem dukungan yang dapat dioptimalkan bagi SPPI:

1. Regulasi PI di Pemerintah Daerah Sistem dukungan yang pertama adalah regulasi di pemerintahan. Regulasi menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan. Beberapa regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, diantaranya:
 - UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 - PP No 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
 - Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.
2. Unit Layanan Disabilitas (ULD) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Unit Layanan Disabilitas (ULD) adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Fungsi ULD menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai fungsi ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah, antara lain:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang
3. Pusat Sumber/ Resource Center (RC) adalah sebuah lembaga yang didirikan untuk memberikan dukungan kepada semua sekolah dimana sekolah mengalami kesulitan dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolahnya.
4. Guru Pembimbing Khusus

Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang memiliki kompetensi kualifikasi S-1 Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa. Kualifikasi pendidikan khusus sesuai dengan tuntutan profesi yang berfungsi sebagai pendukung guru reguler dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus dan/atau intervensi kompensatoris, sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di SPPI. Tugas pokok guru pembimbing khusus antaralain sebagai berikut:

 - a. Membangun sistem koordinasi dan kolaborasi antar dan intertenaga pendidikan dan kependidikan, serta masyarakat.

- b. Membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjang pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha, dll.) Membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjang pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha, dll.)
- c. Menyusun instrumen asesmen akademik dan non akademik bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.

5. Dukungan Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Tugas Komite Sekolah adalah: memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnyadari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnyamelalui upaya kreatif dan inovatif; mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

6. Keterlibatan Keluarga

Orang tua memiliki peran penting dalam mensukseskan pendidikan bagi buah hatinya, apalagi buah hati dengan kebutuhan khusus. Orang tua sebagai orang yang sejak awal hidup bersama dengan anaknya, mereka memahami betul tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Banyak bukti bahwa keterlibatan orang tua dalam kegiatan belajar mempengaruhi keberhasilan bagi PDBK.

Factor Penentu Keberhasilan Pendidikan Inklusi

a. Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar)

Kurikulum sebaiknya berorientasi pada kebutuhan anak supaya anak tidak merasa mendapat tekanan secara psikologis. Kurikulum harus memiliki tujuan/capaian, dan dalam perkembangannya harus dinamis dan konstruktif.

b. Tenaga Pendidik (guru)

Dalam hal ini diperlukan guru yang Professional; memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap tentang materi yang akan diajarkan/dilatihkan, memahami siswa. Seorang guru dituntut menguasai sejumlah keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, antara lain menguasai bahan ajar, mengelola kelas, menggunakan metode, media, dan sumber belajar, serta kemampuan untuk melakukan penilaian, baik proses maupun hasil.

c. Input Peserta Didik

Kemampuan awal dan karakter siswa menjadi acuan utama dalam mengembangkan kurikulum dan bahan ajar serta penyelenggaraan proses belajar mengajar. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: siapa input siswanya?, apakah semua peserta didik berkelainan dapat mengikuti kelas reguler?, bagaimana identifikasinya?, apa alat identifikasinya? Siapa yang akan terlibat dalam indentifikasi?

d. Lingkungan dan Penyelenggara Sekolah

Bila dicermati, maka lingkungan sangat berpengaruh sekali terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi. Selain lingkungan sekitar, peran orang tua, kepala sekolah, dan pemerintah juga sangat menentukan kualitas pendidikan inklusi.

e. Sarana dan Prasarana

keberhasilan pendidikan inklusi. Sarana dan prasarana sebaiknya disesuaikan dengan kurikulum (bahan ajar) yang telah dikembangkan. Sarana dan prasarana menurut Wahyuningrum seperti yang dikutip oleh Mohammad takdir Ilahi (2013: 186) terdiri dari fasilitas fisik dan fasilitas uang. Selanjutnya dikatakan bahwa sarana pendidikan dalam pendidikan inklusif adalah seperangkat peralatan, bahan dan perabotan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.

f. Evaluasi Pembelajaran

Dalam evaluasi belajar, sebagaimana disebutkan dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 7 samapi 9.

Kendsla- Kendala Pelaksanaan Pendidikan Inklusi

Dari berbagai dilema yang terjadi pada pendidikan inklusi di Indonesia, setidaknya harus segera diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan khusus agar tidak menghalangi pelaksanaan implementasi kebijakan tentang pendidikan inklusi. Menurut Sunardi (2009) ada beberapa dilema yang perlu ditangani dengan kebijakan khusus, yakni:

- a. Sistem penerimaan siswa baru, khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. Siswa hanya dapat diterima kalau hasil ujian nasionalnya memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
- b. Dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya dalam mengoptimalkan kemampuan siswa secara komperhensif sesuai dengan keragaman.
- c. Penggunaan label sekolah inklusi dan adanya PP. no. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, pasal 41 ayat 1 tentang keharusan untuk memiliki tenaga kependidikan khusus bagi sekolah inklusi sebagai alasan melakukan penolakan masuknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan, yang ditandai dengan munculnya gejala 'eksklusivisme baru', yaitu menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusi.
- d. Kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel).
- e. Masih dipahaminya pendidikan inklusi secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak disabled children ke sekolah regular, tanpa upaya untuk mengakomodasi kebutuhan khususnya. Kondisi ini dapat menjadikan anak tetap terklusi dari lingkungan karena anak merasa tersisih, terisolasi, ditolak, tidak nyaman, sedih, marah, dan sebagainya. Pada hal makna inklusi adalah ketika lingkungan kelas atau sekolah mampu memberikan rasa senang, menerima, ramah, bersahabat, peduli, mencintai, menghargai, serta hidup dan belajar dalam kebersamaan.
- f. Munculnya label khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk sikap eksklusivisme, seperti sekolah unggulan, sekolah berstandar internasional (SBI), Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI), Sekolah favorit, sekolah percontohan, kelas akselerasi, serta sekolah-sekolah yang berbasis agama. Kondisi ini tentu dapat berdampak kepada sekolah inklusi sebagai sekolah kelas dua (second class), karena menerima ABK sama dengan special school (imam Subakhan. 2009)
- g. Masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusi secara matang dan komperhensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumberdaya, maupun uji coba metode pembelajaran, sehingga hanya terkesan program eksperimental (Cak Fu. 2005).

Persyaratan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK). Dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusi, ada 8 (delapan) komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan (stakeholder) sekolah inklusif, yaitu :

- (1) peserta didik,
- (2) kurikulum,
- (3) tenaga pendidik,
- (4) kegiatan pembelajaran,
- (5) penilaian dan sertifikasi,
- (6) manajemen sekolah,
- (7) penghargaan dan saksi,
- (8) pemberdayaan masyarakat.

Anak Berkebutuhan Khusus

Definisi Anak Berkebutuhan Khusus Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah individu yang mempunyai karakteristik berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara khusus ABK menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya (Bachri, 2010). Berdasarkan definisi dari para ahli di atas ABK dapat diartikan sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tidak selalu ditunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosional atau fisik.

Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

- (1) Tunagrahita, diartikan Individu yang memiliki intelegensi signifikan berada di bawah rata-rata pada umumnya dan disertai dengan ketidak mampuan dalam adaptasi perilaku dalam masa perkembangan (Bandi, 2006).
- (2) Anak berkesulitan belajar (learning disability) adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus maupun umum, baik disebabkan oleh adanya disfungsi neurologist, proses psikologis dasar maupun sebab-sebab lain sehingga prestasi belajarnya rendah dan anak tersebut beresiko tinggal kelas
- (3) Hiperaktif, merupakan gangguan belajar individu yang sifatnya umum terjadi disebabkan faktor kerusakan otak, kekacauan emosi, atau retardasi mental, sehingga individu mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian (Mangunsong, 2011)
- (4) Tunalaras, merupakan individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan control sosial.
- (5) Tunarungu, merupakan individu yang memiliki hambatan baik permanen maupun tida permanen.
- (6) Tunanetra, merupakan individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan.
- (7) Autis, merupakan individu yang memiliki abnormalitas di otak, ditunjukkan dengan ketidak mampuan sosial.
- (8) Tunadaksa, merupakan individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan kelainan neuro-muskular dan struktur tulang bawaan.
- (9) Anak berbakat, merupakan anak-anak dengan IQ di atas 135 dengan kreativitas, motivasi dan ketahanan kerja yang tinggi dalam satu atau lebih pada bidang tertentu.

Pendidikan Inklusi Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus jelas membutuhkan penanganan dan pelayanan khusus agar dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya sesuai dengan derajat dan jenis kekhususan yang dialaminya untuk dapat hidup lebih baik. Pada UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat disebutkan bahwa “Setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Tentunya aspek-aspek tersebut mencakup pula aspek pendidikan yang menjadi kebutuhan semua orang, seperti yang tertulis pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Hal ini menunjukkan bahwa semua anak tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus juga memerlukan pendidikan agar mencapai kesejahteraan sosial. Namun pada kenyataannya, sebagian besar anak berkebutuhan khusus menjadi anak yang dapat dikatakan mendapat pengecualian.

Salah satu pendidikan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah sosial anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdaan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara umum bersama-sama dengan peserta didik umumnya (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, 2009) Atas dasar pengertian dan dasar pendidikan inklusi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Konsep pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan inklusi sangat bermanfaat untuk anak berkebutuhan khusus dan masyarakat. Dampak yang paling esensial adalah sekolah inklusi mengajarkan nilai sosial berupa kesetaraan. Misalnya adanya sikap positif bagi siswa berkelainan yang berkembang dari komunikasi dan

interaksi dari pertemanan dan kerja sebaya. Siswa belajar untuk sensitif, memahami, menghargai, dan menumbuhkan rasa nyaman dengan perbedaan individual.

Selain itu, anak berkelainan belajar keterampilan sosial dan menjadi siap untuk tinggal di masyarakat karena mereka dimasukkan dalam sekolah umum. Dan dengan sekolah inklusi, anak terhindar dari dampak negatif dari sekolah segregasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A., C. F. (2013). Penerapan Pendidikan Inklusi Pada Pembelajaran Taman Kanak-kanak Kelompok A (Studi kasus di komimo playschool yogyakarta). *Universitas Negeri Yogyakarta*, 8-15.
- Astawa, N. T. (2021). Pendidikan Inklusi Dalam Memajukan Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Hindu*, 65 - 74.
- Dr. Irdamurni, M. (2019). *Pendidikan Inklusif (Solusi dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus)*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Dr. Joko Yuwono, M. D. (2021). *Buku Saku Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar*. Jakarta : Direktorat Sekolah Dasar.
- Fransiska Angelia Dhoka, F. P. (2023). Pendidikan Inklusi Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi* , 25-27.
- Puspita, Y. (2021). Proses Pembelajaran Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di SDIT Al Afa Kota Bengkulu. *Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*, 17-25.
- Retnoasih, P. (2019). Pola Interaksi Sosial Pada Pendidikan Inklusi Di SD N SUDIRMAN AMBARAWA. *Universitas Semarang*, 30-40.
- Rofikoh, S. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi (studi kasus MTS Al-hidayah Purwokerto). *UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 19-26.